

**PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE SEBAGAI  
 PERWUJUDAN VISI-MISI KEPALA DAERAH TERPILIH DI  
 KABUPATEN SINTANG PERIODE 2016-2021**

**Mardawani<sup>1</sup>, Dessy Triana Relita<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persada Khatulistiwa Sintang  
 Jl. Pertamina, Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78613

Alamat e-mail: <sup>1</sup>[mardawani113@yahoo.co.id](mailto:mardawani113@yahoo.co.id) <sup>2</sup>[dssytriana.relita@gmail.com](mailto:dssytriana.relita@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu ingin mengkaji lebih mendalam dari sisi ilmiah mengenai pelaksanaan *Good Governance* perwujudan visi-misi Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode 2016-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif bentuk penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah dimulai sejak tahun pertama pemerintahan Bupati terpilih. Beberapa desa telah dibuka akses jalan, pembangunan sekolah, air bersih, puskesmas dan lain sebagainya. Namun tentunya sampai sekarang (2 tahun) kepemimpinan belum semuanya tercapai, hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: 1). Anggaran yang terbatas; 2). Luasnya wilayah kabupaten Sintang sehingga sulit terjangkau; 3). Dukungan dari pemerintah baik provinsi maupun pusat yang masih terbatas; dan lain sebagainya. Strategi yang digunakan dalam pencapaian *Good Governance* yaitu strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pemakai jasa, strategi pengendalian, dan strategi budaya. Secara umum ketercapaian *good governance* menunjuk pada suatu proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan *stakeholders* yang luas dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan politik dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan masyarakat menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

**Kata Kunci:** *good governance*; perwujudan visi-misi;

**Abstract**

*The purpose of this research is to examine more deeply the scientific side regarding the implementation of Good Governance in the realization of the vision and mission of the Sintang District Head for the 2016-2021 period. The research method used is qualitative descriptive form of case study research. The results of the study show that the implementation of the program has been started since the first year of the elected Regent's administration. Several villages have opened road access, school construction, clean water, health centers and so on. But of course until now (2 years) leadership has not all been achieved, this is caused by several obstacles, including: 1). Limited budget; 2). The extent of the Sintang district makes it difficult to reach; 3). Support from both provincial and central government is still limited; and so forth. The strategies used in achieving good governance are core strategies, consequence strategies, service user strategies, control strategies, and cultural strategies. In general, the achievement of good governance refers to a process of governance through broad involvement of stakeholders in various fields such as the economic, social and political fields and the utilization of natural resources, public finance in the interests of all parties in accordance with the principles of justice, honesty, equality, efficiency, transparency and accountability.*

**Keywords:** *good governance*; the embodiment of vision-mission;

## PENDAHULUAN

Menurut Bank Dunia (World Bank) *Good governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009). Pentingnya *good governance* bagi keberlangsungan sebuah proses pemerintahan pada suatu daerah karena mengandung kebermanfaatan yang menyeluruh bagi semua aspek pembangunan. United National Development Planning (UNDP), menegaskan *Good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar *good governance* yang penting, yaitu: a). Kesejahteraan rakyat (*economic governance*), b). Proses pengambilan keputusan (*political governance*), dan c). Tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance*) (Prasetijo, 2009).

Sementara menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam Hardjasoemantri (2003), *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: (1). Partisipasi masyarakat, (2). Tegaknya supremasi hukum, (3). Transparansi, (4). Peduli dan stakeholder, (5). Berorientasi pada consensus, (6). Kesetaraan, (7). Efektifitas dan efisiensi, (8). Akuntabilitas, dan (9). Visi strategis.

Ketercapaian *good governance* tidak terlepas dari komitmen dan upaya bersama stakeholder. Dalam proses memaknai peran kunci *stakeholder* (pemangku kepentingan), mencakup 3 domain *good governance*, yaitu:

1. Pemerintah yang berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif.
2. Sektor swasta yang berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan.
3. Masyarakat yang berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi (Efendi, 2005).

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) tentu tidak mudah terwujud, disaat upaya pemerintah membangun kembali kepercayaan masyarakat muncul berbagai tantangan yang menghambat, diantaranya: kepentingan politik, KKN, minim integritas, ketimpangan penegakan hukum, krisis mental,

kemerosotan moral dan lain sebagainya. Ditengah situasi yang demikian, hampir seluruh kepala daerah di Indonesia dalam visi-misi kepemimpinannya bertekad melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk Bupati terpilih pemerintahan Kabupaten Sintang periode 2016-2021, sebagai Bupati terpilih pasangan Bapak dr. Jarot Winarno, M. Med. Ph dan Bapak Drs. Askiman, MM.

Tidaklah mengherankan apabila pemerintah daerah Kabupaten Sintang bertekad melaksanakan program-programnya dengan pengelolaan yang baik, sebab “dalam pelaksanaan pemerintahan daerah harus disertai dengan tanggung jawab kepada publik sehingga memenuhi harapan masyarakat di daerah” (Widjaja, 2013:24).

Kaitannya dengan pemerintahan yang berkuasa sekarang, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sintang periode 2016-2021 dalam visinya mengisyah"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera, Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih Pada Tahun 2021" mengisyaratkan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Bagaimana pelaksanaannya sejauh ini pada dinas dan instansi yang dipimpinnya. Sementara itu, pada dua tahun berjalan era kepemimpinan hasil survey Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menemukan hasil atas 50 item yang dinilai pelayanan publik di Kabupaten Sintang nilai rata-rata 39,28, yang artinya pelayanan publik masih pada zona merah (terburuk). Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih mendalam dari sisi ilmiah lewat penelitian ilmiah pada bidang terapan ini.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian study kasus. Bentuk desain penelitian studi kasus setting tunggal. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Sintang (Bupati, Wakil Bupati dan sekda) Provinsi Kalimantan Barat. Objek pada penelitian ini adalah dinas dan instansi terkait selaku pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Penentuan subjek dan objek penelitian

*purposive sampling* atau sampel bertujuan. Jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah informan (Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas terkait), peristiwa di lokasi dan dokumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, pedoman wawancara, catatan lapangan dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif memanfaatkan persentase hanya merupakan langkah awal dari proses analisis data. Dalam proses selanjutnya analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu catatan lapangan, pengumpulan informasi, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan *Good Governance* Sebagai Perwujudan Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih Di Kabupaten Sintang Periode 2016-2021**

Visi-misi pemerintahan terpilih di Kabupaten Sintang periode 2016-2021 yang dipaparkan sebagai berikut Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera, Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021"

Terdapat beberapa program prioritas yang ditargetkan dan sejauhmana telah dilaksanakan diantaranya:

- a) Membangun dari pinggiran
- b) Penanggulangan kedaruratan infrastruktur
- c) Percepatan listrik masuk desa
- d) Hilirisasi produk
- e) Penataan wilayah
- f) Reformasi birokrasi

Membangun dari pinggiran, bermakna bahwa segala aspek pembangunan dimulai dari desa atau kampung. Dasar pemikiran utama program ini menjadi prioritas pemerintah terpilih adalah hasil pengamatan selama bertahun-tahun bahwa sulitnya pembangunan menjangkau daerah secara keseluruhan, pembangunan selama ini cenderung dinikmati dan terpolarisasi di pusat atau

perkotaan. Dampak dari pembangunan yang hanya terpusat diperkotaan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi kehidupan masyarakat. Daerah pinggiran atau pedesaan menjadi semakin tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan. Sementara disisi lain, di kabupaten Sintang penduduk terbanyak berada atau tinggal di pedesaan. Rata-rata desa dan dusun yang ada di wilayah Kabupaten Sintang masih terisolir dan membutuhkan sentuhan pembangunan. Keadaan geografis dan demografis Sintang berimplikasi pada pelayanan fasilitas pemerintah yang kurang maksimal.

Konsep yang dicanangkan oleh Bupati terpilih adalah bagaimana membangkitkan pembangunan masyarakat yang dimulai dari program untuk membangun masyarakat pedesaan yang masih tertinggal. Program ini juga mendukung nawacita pemerintahan presiden RI bapak Ir. Joko Widodo pada point yang ke-tiga yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam rangka negara kesatuan”. Pelaksanaan program telah dimulai sejak tahun pertama pemerintahan Bupati terpilih. Beberapa desa telah dibuka akses jalan, pembangunan sekolah, air bersih, puskesmas dan lain sebagainya. Namun tentunya sampai sekarang (2 tahun) kepemimpinan belum semuanya tercapai, hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh narasumber disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: 1). Anggaran yang terbatas; 2). Luasnya wilayah kabupaten Sintang sehingga sulit terjangkau; 3). Dukungan dari pemerintah baik provinsi maupun pusat yang masih terbatas; dan lain sebagainya.

Penanggulangan kedaruratan infrastruktur dasar, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, persekolahan dan lain-lain. Tak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur dasar di Kabupaten Sintang masih tergolong sangat parah. Hal ini terlihat dari masih banyak yang rusak parah seperti jalan, jembatan, fasilitas gedung sekolah dan sarana kesehatan. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa infrastruktur yang memadai sangat diperlukan masyarakat. Akses jalan yang baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan akan mempercepat peningkatan taraf hidup bagi masyarakat.

Percepatan listrik masuk desa, hampir sebagian besar desa yang ada di Kabupaten Sintang belum mendapatkan fasilitas listrik negara. Bahkan desa-desa

yang jarak tidak terlalu jauh dari pusat kota / kabupaten juga masih ada yang tidak terjangkau fasilitas listrik (PLN). Di era sekarang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan. Hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia sangat bergantung pada listrik.

Hilirisasi produk, untuk menambah nilai barang mentah dilakukan upaya hilirisasi produk misalnya produk perkebunan dan hasil hutan agar tidak dijual sebagai bahan mentah akan tetapi dapat berupa barang jadi atau setengah jadi. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar barang memiliki nilai tambah maka harusnya diolah menjadi bentuk lain yang memiliki nilai tambah. Kabupaten Sintang sebagian masyarakat masih hidup bergantung pada hasil alam atau perkebunan yang dijual dalam bentuk bahan mentah. Belum terdapat pabrik pengolahan itu juga menjadi kendala tersendiri.

Reformasi birokrasi, penataan pemerintahan melalui mutasi dan pelelangan jabatan untuk mengisi kekosongan dan efektivitas kinerja pelayanan publik. 2 (dua) tahun masa pemerintahan Bupati terpilih di kabupaten Sintang, sudah berjalan penataan atau reformasi birokrasi. Ini terbukti dari adanya transparansi pengangkatan pejabat sesuai dengan kompetensi dan persyaratan teknis lainnya. Adanya pelelangan jabatan dan mutasi baik untuk penyegaran instansi maupun yang terkait dengan upaya optimalisasi kinerja pejabat yang bersangkutan. Reformasi birokrasi sangat penting, terutama berkaitan dengan sistem yang langsung menyangkut pelayanan publik.

### **Strategi Pelaksanaan *Good Governance* Sebagai Perwujudan Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih Di Kabupaten Sintang Periode 2016-2021**

Dalam rangka mewujudkan visi-misi maka diperlukan strategi pencapaian yang terukur. Kabupaten Sintang dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021.”

Untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance* secara konsisten dan *sustainable* (berkelanjutan) tentu bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi *good*

*governance* tersebut diarahkan pada upaya penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa. Untuk itu, jajaran birokrasi pemerintahan harus memahami esensi birokrasi itu sendiri dikaitkan dengan penciptaan *good governance* yang dimaksud. Dalam konteks ini David Obsorn dan Gaebler (1992) menyampaikan 10 konsep birokrasi sebagai berikut:

- a) *Catalytic Government: Steering rather than rowing.* Aparatur dan birokrasi berperan sebagai katalisator, yang tidak harus melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dengan demikian aparatur dan birokrasi harus mampu mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai dengan kepentingan publik.
- b) *Community-owned government: empower communities to solve their own problems, rather than merely deliver service.* Aparatur dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian dalam pelayanannya. Organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti koperasi, LSM dan sebagainya, perlu diajak untuk memecahkan permasalahannya sendiri, seperti masalah keamanan, kebersihan, kebutuhan sekolah, pemukiman murah dan lain-lain.
- c) *Competitive government: promote and encourage competition, rather than monopolies*". Aparatur dan birokrasi harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. Dengan adanya persaingan maka sektor usaha swasta dan pemerintah bersaing dan terpaksa bekerja secara lebih profesional dan efisien.
- d) *Mission-driven government: be driven by mission rather than rules*". Aparatur dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaianapa yang merupakan "misinya" dari pada menekankan pada peraturan-peraturan. Setiap organisasi diberi kelonggaran untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan misinya.
- e) *Result-oriented government: result oriented by funding outcomes rather than inputs.* Aparatur dan birokrasihendaknya berorientasi kepada kinerja yang baik. Instansi yang demikian harus diberi kesempatan yang lebih besar dibanding instansi yang kinerjanya kurang.

- f) *Customer-driver government: meet the needs of the customer rather than the bureaucracy.* Aparatur dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan dirinya sendiri.
- g) *"ente prising government: concretrate on earning money rather than just speding it.* Aparatur birokrasi harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisasinya, disamping pandai menghemat biaya. Dengan demikian para pegawai akan terbiasa hidup hemat.
- h) *Anticipatory government: invest in preventing problems rather than curing crises.* Aparatur dan birokrasi yang antisipasif. Lebih baik mencegah dari pada memadamkan kebakaran. Lebih baik mencegah epidemi daripada mengobati penyakit. Dengan demikian akan terjadi "*mental swich*" dalam aparat daerah.
- i) *Decentralilazed government: decentralized authority rahter than build hierarcy.* Diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, dari berorientasi hirarki menjadi partisipasif dengan pengembangan kerjasama tim. Dengan demikian organisasi bawahan akan lebih leluasa untuk berkreasi dan mengambil inisiatif yang diperlukan.
- j) *Market-oriented government: solve problemby influencing market forces rather than by treating public programs.* Aparatur dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar. Pasokan didasarkan pada kebutuhan atau permintaan pasar dan bukan sebaliknya. Untuk itu kebijakan harus berdasarkan pada kebutuhan pasar.

Agar lembaga pemerintah lebih mampu melaksanakan fungsi pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu diciptakan suatu sistem borikrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Memiliki struktur yang sederhana, dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan (pengmembangan kebijakan dan pelayanan) secara arif, efesien dan efektif.
- b) Mengembangkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara pemerintah dan setiap unsur dalam masyarakat yang bersangkutan (tidak sekedar kemitraan internal diantara sesama jajaran instansi pemerintahan saja).



- c) Memahami dan komit akan manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
- d) Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya motivasi, kemampuan dan keberanian menanggung resiko (*risk taking*) berinisiatif, partisipatif, yang telah diperhitungkan secara realistis dan rasional.
- e) Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (kode etik) administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai etika dan moralitas yang diakui dengan junjungan tinggi secara sama dengan masyarakat yang dilayani.

Disebutkan oleh responden sebagaimana pernyataannya pada sebuah media menyatakan bahwa salah satu strategi adalah mengimplementasikan RPJMD Sintang tahun 2016-2021, yakni bagi Bupati terpilih bahwa tahun 2017 sebagai tahap konsolidasi dalam merealisasikan RPJMD. Prosesnya tidak hanya berhenti pada tahapan itu saja. Masih ada empat tahapan tersisa mesti dijalani. 2018 disebut tahap penguatan, tahun 2019 sebagai tahap percepatan, tahun 2020 sebagai tahap pengembangan dan tahun 2021 sebagai tahap pemantapan. Bupati terpilih optimis pemerintahan dapat mencapai visi-misi secara optimal dengan membuat konsep dan strategi yang tepat serta konsistensi yang kuat mengatasi berbagai masalah untuk memajukan pembangunan.

Untuk mempertajam pemahaman tentang karakteristik *good governance*, Mustopadidjadja AR (1999) dan Riyas Rasyid (2000) merekomendasikan 6 (enam) karakteristik *good governance* yang harus menjadi acuan dalam mengarahkan kebijakan sistem pemerintahan yaitu *pertama*, adanya kepastian hukum, keterbukaan, profesional dan memiliki akuntabilitas. *Kedua*, menghormati hak asasi manusia. *Ketiga*, dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi. *Keempat*, mampu mengakomodasi kontrol sosial masyarakat. *Kelima*, partisipasi, otonomitas dan desentralisasi dan *keenam*, berkembangnya sistem *checks and balance*.

- a) *Pertama*, prinsip kepastian hukum yang dimaksud adalah prinsip kepastian hukum yang meliputi penciptaan sistem hukum yang benar dan adil dalam

lingkup hukum nasional (dalam keseluruhan tatanan administrasi pemerintahan), hukum adat dan hukum kemasyarakatan, pemberdayaan pranata hukum, desentralisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh DPR.

- b) *Kedua*, prinsip keterbukaan yang meliputi penumbuhan iklim yang kondusif bagi terlaksananya pengakuan terhadap hak asasi manusia, transparansi informasi secara benar, jujur dan adil.
- c) *Ketiga*, prinsip akuntabilitas, yang meliputi kejelasan rencana kerja prosedur dan mekanisme kerja, dengan sistem pertanggung jawaban yang jelas serta pemberlakuan sistem pemberian ganjaran dan sanksi yang konsisten.
- d) *Keempat*, prinsip profesionalitas yang meliputi kapabilitas, kompetensi dan integritas.
- e) *Kelima*, partisipasi, otonomitas dan desentralisasi sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.
- f) *Keenam*, berkembangnya sistem *check and balance*, pada akhirnya terwujud *good governance* memerlukan terlaksananya sistem *checks and balance* yang berkembang dari dan dalam keseluruhan unsur penyelenggaraan negara.

### **Ketercapaian Pelaksanaan *Good Governance* Sebagai Perwujudan Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih Di Kabupaten Sintang Periode 2016-2021.**

Secara umum ketercapaian *good governance* menunjuk pada suatu proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan *stakeholders* yang luas dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan politik dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan masyarakat menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Tata pemerintahan melalui proses pengisian LKBD 2016-2017 dari 14 Desa kita menempati ranking tertinggi Kalimantan Barat, meskipun belum mendapatkan insentif daerah dari pemerintah. Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi dan kinerja daerah mencakup kriteria utama dan kategori kinerja. Kriteria utama yang dimaksud, meliputi opini Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), penetapan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD tepat waktu, dan penggunaan *e-procurement*.

Sebagaimana ketentuan pemerintah, bahwa untuk mendapatkan dana insentif daerah dinilai dari 10 kategori. Sistem penilaian diubah dari semula satu kategori yang bersifat umum menjadi 10 Adapun 10 kategori kinerja yang dimaksud, yaitu *pertama*, kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Kategori ini dinilai berdasarkan pengumpulan pajak daerah, kualitas belanja, kualitas perencanaan keuangan, ruang fiskal dan SILPA. *Kedua*, kategori penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai berdasarkan indikator penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPDP) dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Ketiga*, kategori perencanaan daerah yang dinilai berdasarkan perencanaan terbaik, perencanaan progresif, dan perencanaan inovatif. *Keempat*, kategori sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dinilai berdasarkan indikator perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi, dan capaian kinerja.

*Kelima*, kategori inovasi pelayanan publik yang dinilai berdasarkan inovasi memiliki pendekatan baru, produktif, memiliki dampak dan berkelanjutan. *Keenam*, kategori kemudahan investasi yang dinilai dari ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu yang dinilai dari aspek SDM, sarana dan prasarana serta kelembagaan. *Ketujuh*, kategori pelayanan publik di bidang pendidikan yang dinilai berdasarkan indikator rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni SMP, dan harapan lama sekolah. *Kedelapan*, kategori pelayanan publik di bidang kesehatan yang dinilai dari indikator penurunan presentase bayi dua tahun stunting, peningkatan presentase balita yang diimunisasi dan cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan. *Kesembilan*, kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur yang dinilai berdasarkan indikator rumah tangga dengan akses tenaga kerja dengan akses air minum layak, rumah. *Kesepuluh*, kategori kesejahteraan masyarakat yang dinilai berdasarkan indikator presentase penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia.

Dari ke-10 kategori tersebut sebagian belum terpenuhi sehingga hal tersebutlah yang menjadi penyebab mengapa kabupaten Sintang, walaupun

mendapat opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik namun tidak mendapatkan dana insentif daerah. Namun secara umum tata kelola pemerintahan yang baik *good governance* telah berjalan dengan baik, yang ditandai dengan beberapa indikator ketercapaian (berdasarkan indikator yang ditetapkan pemerintah kabupaten Sintang melalui visi-misi 2016-2021) berikut:

- 1) Penetapan APBD yang tepat waktu
- 2) Opini WTP dari BPK
- 3) Penempatan Pejabat Daerah berdasarkan kompetensi
- 4) Tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan *good governance* sebagai perwujudan visi-misi kepala daerah terpilih di Kabupaten Sintang periode 2016-2021 dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yakni: membangun daerah pinggiran, penanggulangan kedaruratan infrastruktur, percepatan listrik masuk desa, hialisasi produk, pentaan wilayah, reformasi birokrasi. Selanjutnya strategi pelaksanaan dalam mewujudkan VISI dan MISI Kabupaten Sintang. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah. Secara umum ketercapaian *good governance* menunjuk pada suatu proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan *stakeholders* yang luas dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan politik dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan masyarakat menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai

prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Faried & Muhidin, Nurlina. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Bandung: Refika Aditama.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Media Group.

Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Lembaga Daerah*. Malang : Setara Press.

<http://spiritbloging.blogspot.com/2012/01/modul-9-tata-kelola-pemerintahan-yang.html>

<https://www.edukasippkn.com/2015/10/ciri-ciri-pemerintahan-yang-terbuka-dan.html>

Juliansyah, Elvi. 2007. *PILKADA Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: CV Mandar maju.

Malau, Hasbullah. 2013. *Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat*. Jurnal: TINGKAP Vol. IX No. 2 Th. 2013.

Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish

Miles, Mattew B dan Hubermen, Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*, Terjemahan Tjetjep Rohendy (2007), Jakarta: UI Press.

Rorong, E Mirando dkk. *Implementasi Kebijakan Good Governance Pada Sekretariat Daerah Kota Bitung*.

Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, Haw. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yin, Robert K. 2000. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.